**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDIRIAN BANGUNAN DI TANAH
SEMPADAN PANTAI MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DITINGKAT REGIONAL**

***ENFORCEMENT OF LAWS IN THE ESTABLISHMENT OF BUILDINGS ON
COASTAL BORDER LAND TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE
REGIONAL LEVEL***

Yoga Nuryana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
yoganuryana115@gmail.com

Rani Mariana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa tanah harus dimanfaatkan sebagai fungsi sosial dan dijaga keberlanjutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Salah satu langkah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah pengaturan tanah sempadan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sempadan pantai didefinisikan sebagai daerah daratan sepanjang tepi pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai disesuaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan karakteristik topografi, biofisik, dan hidro-oseanografi pantai, serta mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, budaya, dan perlindungan terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, erosi, abrasi, serta untuk melindungi ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori, konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta studi pustaka yang mencakup buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap masyarakat yang membangun bangunan di wilayah tanah sempadan pantai, seperti yang terjadi di pantai Cipatujah, Batukaras di Jawa Barat, dan pantai Tanjung Bunga di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah setempat seyogyanya perlu mengubah fungsi tanah sempadan pantai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau bisnis, agar kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat untuk membangun tempat usaha baru bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata dan kuliner, dengan mempertimbangkan posisi garis sempadan terbaru yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Sempadan Pantai, Penegakan Hukum, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

The Basic Agrarian Law stipulates that land must be used for social purposes and its sustainability must be maintained, as regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. One important step in sustainable environmental management is the regulation of coastal land, as explained in Law No. 27 of 2007 on Coastal Zone and Small Islands Management. Coastal buffers are defined as land areas along the coastline with a minimum width of 100 meters from the highest tide line inland. The boundaries of coastal buffers are determined by local governments based on the

topographical, biophysical, and hydro-oceanographic characteristics of the coastline, while considering economic and cultural needs, as well as protection against natural disasters such as earthquakes, tsunamis, erosion, abrasion, and to protect coastal ecosystems. This study uses a normative juridical method with a theoretical, conceptual, and analytical approach to legislation, as well as a literature review covering books, notes, and previous research reports to strengthen its analysis. The research findings indicate that the existing legislation has not provided firm legal enforcement against individuals who construct buildings in coastal setback areas, as observed in locations such as Cipatujah and Batukaras beaches in West Java, and Tanjung Bunga beach in South Sulawesi. Therefore, it is advisable for local governments to reassign the function of coastal setback lands—previously used for private or business purposes—to be managed directly by the local government. This management should aim to develop new business facilities for local communities, particularly in the tourism and culinary sectors, while taking into account the most recent coastal setback boundaries as officially designated.

Keywords: Coastal Boundaries, Law Enforcement, Sustainable Development.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat wajib melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang kehidupan bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."*¹ Salah satu implementasi dari amanat ini adalah Nawacita yang digagas oleh Presiden Jokowi, yang bertujuan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kebijakan ini strategis karena memperkuat wilayah pesisir dan desa menjadi pilar utama nasional untuk bersaing di tingkat global, sehingga pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), tetapi dilakukan secara merata di seluruh pelosok Indonesia (desentralisasi).²

Salah satu langkah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pengaturan tanah sempadan. Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007),³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

² Fauzan, dkk., *"Penegakan Hukum terhadap Bangunan di Wilayah Pesisir Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Kearifan Lokal"*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 4 No. 1 (2024).

³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Angka (27).

sempadan pantai didefinisikan sebagai daratan sepanjang tepi pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik topografi, biofisik, dan hidro-oseanografi pantai masing-masing, serta mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, budaya, dan perlindungan terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, erosi, abrasi, dan perlindungan terhadap ekosistem pesisir.

Penentuan letak garis sempadan pantai didasarkan pada karakteristik pantai, fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi di pantai tersebut. Untuk kawasan pantai budidaya atau non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian atau keterjalan pantai. Sementara itu, untuk kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi. Mengingat sifat laut yang dinamis, posisi dan letak garis sempadan pantai kemungkinan besar akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Abrasi yang terus-menerus terjadi di kawasan pantai harus dipertimbangkan dalam penetapan garis sempadan pantai. Kikisan gelombang ombak yang semakin mendekati pesisir karena abrasi akan menyebabkan garis pantai semakin mundur. Jika garis pantai berubah, maka otomatis garis sempadan pantai juga berubah, sehingga pemantauan garis sempadan pantai sangat diperlukan.⁴

Pengkualifikasian kawasan-kawasan garis sempadan pantai, perlu diperhatikan mengingat dengan letak geografis Indonesia yang rawan bencana dan penataan ruang di daerah belum semuanya merata sempurna. Secara praktis, penetapan bidang tanah tertentu sebagai sempadan pantai bukan hanya masalah penataan ruang, tetapi juga berdampak pada pembangunan regenerasi di masa mendatang. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)⁵ tidak mengatur secara tegas hak penguasaan atas tanah di kawasan tanah sempadan, dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 hanya menyatakan untuk pemanfaatan perairan pesisir dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), akan tetapi pengaturan ini tidak termasuk dalam kategori sempadan pantai.⁶

Dengan melihat mekanisme pengaturan demikian, penegakan hukum yang efektif perlu ditegakkan terhadap penetapan pendirian bangunan di tanah sempadan pantai agar

⁴ Reskiyanti,dkk., *"Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2014"*, Sensistel , Vol. 1, No. 1 (2018).

⁵ Undang No mor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶ Salvian,dkk., *"Kepastian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Bagi Pemilik Sebidang Tanah Yang Diperuntukkan Sebagai Sempadan Pantai"*, Jurnal Education And Development, Vol. 8 No.2, (2020).

tidak menjadi masalah yang krusial, sehingga mencegah kerusakan lingkungan serta memastikan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang dapat terjaga dengan baik setiap generasinya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal yang mengandalkan tanah sempadan pantai untuk kegiatan ekonomi seperti wisata dan kuliner. Diperlukan juga investasi sosial yang dapat menjaga hubungan kerjasama yang solid antara berbagai lembaga pemerintahan, baik dalam hierarki maupun lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan pendekatan melibatkan banyak pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang memperhatikan lingkungan juga penting untuk meningkatkan hasil pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat di wilayah pesisir pantai. Oleh karena itu, yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam pendirian bangunan di tanah sempadan pantai menuju pembangunan berkelanjutan di tingkat regional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti analisis masalah dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur, dan kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana masalah yang diangkat dikaji dan dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang menganalisis masalah berdasarkan pandangan atau pemikiran para ahli. Pendekatan-pendekatan ini didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan literatur berupa buku, catatan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis.⁷

III. Pembahasan

Menurut Pasal 6 UUPA, menyatakan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Pasal ini dianggap sebagai asas hukum tanah yang dikenal sebagai Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah. Fungsi sosial ini menjadi dasar penting untuk memastikan

⁷ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm 31.

tanah digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam Konsep Negara Kesejahteraan. Asas ini memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan Negara Kesejahteraan seperti Indonesia, memastikan hak atas tanah digunakan demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konstitusi UUD 1945.⁸

Meskipun tanah memiliki fungsi sosial, perlu dipahami bahwa ada pembatasan atas kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam perspektif reforma agraria. Merujuk pada Pasal 7 UUPA, pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas, dilarang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan mengakhiri *groot-grondbezit*, yaitu penumpukan kepemilikan tanah di tangan beberapa orang tertentu. Apabila tanah sepanjang garis sempadan pantai tetap dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, maka selain mengabaikan fungsi sosial tanah, hal ini juga akan melanggar pembatasan hak atas tanah. Jika masalah ini tidak diatasi, maka akan terjadi kesenjangan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Mereka yang memiliki modal besar akan berkuasa, sedangkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akan merasa dirugikan. Sementara itu, negara cenderung bersikap pragmatis dengan membiarkan situasi ini dengan alasan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.⁹

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak hanya aspek fungsi sosial saja, namun aspek keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya perlu diperhatikan. Selain itu juga kualitas kehidupan masyarakat setempat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No 1 Tahun 2014) Pasal 1 angka 31 menjelaskan bahwa "*Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari*".¹⁰

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang diartikan sebagai pembangunan untuk masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia pada tahun 1987, yang dipimpin oleh Perdana

⁸ Rejekiningsih, T., "*Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (Suatu tinjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)*", Jurnal Yustisia, Vol. 5 No. 2, (2016), Hlm 301.

⁹ Reki, N. D., "*Pembatasan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam perspektif reforma agraria*", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 1 No. 1, (2018), Hlm 37.

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau , Pasal 1 angka 31.

Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Pertemuan ini mengawali semacam revolusi kedua dalam pembangunan nasional, yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus merusak lingkungan. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dan lingkungan dapat bersinergi, memungkinkan tercapainya kesejahteraan yang diidamkan. Pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan nasional yang memberi kemampuan bagi negara untuk melestarikan lingkungannya. Di sisi lain, kondisi lingkungan yang baik tidak menguras dana pembangunan, tetapi justru mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹¹

Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama masalah lingkungan. Karena sifat eksternalitas dari dampak lingkungan, para pelaku usaha sering tidak menyadari dampak negatif dari aktivitas mereka. Dampak tersebut biasanya terasa dalam jangka panjang, berbeda jika dampaknya bersifat internalitas, dimana pelaku perusakan lingkungan juga merasakan akibatnya. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan agar tidak merugikan pihak lain.

Tindakan masyarakat terhadap sumber daya pesisir disebabkan oleh dua faktor:¹²

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa kegiatan mereka mengancam kesinambungan sumber daya pesisir dan laut. Aktivitas destruktif yang tidak disadari ini memicu berbagai kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai.
2. Ketiadaan alternatif mata pencaharian selain daripada nelayan, wisata dan kuliner. Beberapa masyarakat pesisir yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tinggi tentang dampak negatif dari aktivitas destruktif tetap melakukannya, karena tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk melindungi wilayah pesisir pantai, pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan melindungi seluruh wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kebijakan ini harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007, Pasal 4 menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan:

¹¹ Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional", *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9 No. 1, (2020), Hlm 39-50.

¹² Fauzan, dkk., op.cit. 2024.

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sisteim ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang yang ingin melakukan pembangunan di wilayah pesisir pantai harus memperhatikan garis sempadan pantai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam membangun suatu bangunan;
2. Menciptakan lingkungan yang serasi, tertib, indah, dan teratur; dan
3. Memberikan pedoman dan landasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Secara mendasar, aspek penegakan hukum di Indonesia telah mempertimbangkan hal tersebut. Hukum berfungsi sebagai peraturan yang diterapkan dalam masyarakat dengan cara memberikan sanksi kepada para pelanggar. Dalam proses pembentukannya, hukum menitikberatkan pada kepentingan negara dan kepentingan umum masyarakat. Meskipun demikian, pelanggaran hukum seringkali terjadi karena lemahnya penegakan hukum oleh aparat, sehingga masyarakat menganggap hukum tidak efektif dan cenderung enggan untuk mematuhi peraturan yang ada.¹³

Kebijakan hukum di Indonesia mengacu pada pembuatan peraturan perundang-undangan serta implementasi dari peraturan-peraturan tersebut. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memindahkan sebagian besar urusan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah ini memungkinkan setiap

¹³ Zainah, Z. O., “Penegakan hukum dalam masyarakat, *Jurnal of Rural and Development*”, Vol. 3, No. 2, (2012), hlm. 167.

daerah di Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengelola wilayah sempadan pantai.¹⁴

Pemerintah daerah setempat memegang peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait ketentuan garis sempadan pantai. Jika bangunan melanggar ketentuan garis sempadan pantai, seharusnya tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan (IMB). Namun, pada kenyataannya, bangunan yang berada di wilayah tanah sempadan, seperti di pantai Cipatujah, Batukaras di Jawa Barat, dan pantai Tanjung Bunga di Sulawesi Selatan, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1), *"Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi."*¹⁵ Meskipun demikian, yang menjadi alasan masyarakat banyak bangunan yang sudah berdiri sebelum adanya peraturan garis sempadan pantai tetap berdiri tanpa izin.¹⁶

Kurangnya pemahaman oleh aparat desa, kecamatan, dan kabupaten, serta kurangnya kesadaran dari tokoh masyarakat dan jajarannya tentang pentingnya mematuhi ketentuan garis sempadan pantai di kawasan pesisir menjadi penyebab utama meningkatnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan keindahan, kebersihan, dan keamanan di sekitar kawasan pesisir, tetapi juga melibatkan keselamatan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

Dari perspektif regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait konsep tata ruang wilayah pesisir pantai, jelas diatur bahwa tidak boleh ada pembangunan di atas tanah sempadan pantai dengan jarak radius 100 meter. Fenomena ini mirip dengan yang terjadi di Bali, di mana terjadi tren privatisasi kawasan sempadan yang dimanfaatkan oleh investor atau pengusaha untuk keuntungan pribadi mereka melalui investasi pariwisata. Privatisasi secara umum mengacu pada proses peralihan kepemilikan dari publik menjadi pribadi. Di Bali, privatisasi sempadan pantai berarti pengambilalihan area publik, seperti pantai oleh pihak swasta atau pengusaha pariwisata untuk kepentingan bisnis mereka, mengubah fungsi pantai yang sebelumnya bisa dinikmati oleh masyarakat umum dan lokal menjadi terbatas hanya untuk wisatawan. Praktik ini, seperti pengkaplingan lahan

¹⁴ Anjiwani, P. K., *"Pengaturan hukum terhadap privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pantai di provinsi Bali"*. Analisis Pariwisata, vol. 16, no. 1, (2016), hlm. 3.

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1).

¹⁶ Yuwono, dkk., *"Telaah Sosiologis Penyebab Pelanggaran Penguasaan Tanah Di Lingkungan Pesisir Di Kabupaten Lampung Selatan"*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5, No. (2021), hlm. 369-376.

sempadan pantai di Bali Selatan, telah menyebabkan ketidakpuasan dan kehilangan hak serta kebebasan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut.¹⁷

Pelanggaran atas pendirian bangunan di lokasi sempadan pantai perlu diminimalisir mengingat bahwa ketika garis sempadan pantai terus digerus untuk kepentingan-kepentingan pribadi, maka akan sulit untuk dilakukan sebuah upaya pelestarian dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebetulnya adalah surga sumber daya alam bagi masyarakat itu sendiri. Daerah sempadan pantai harus dijadikan sebagai daerah konservasi, bagi daerah yang sudah terlanjur dipenuhi dengan bangunan di sepanjang pantainya, perlu dilakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar di kawasan tersebut atau paling tidak diminimalkan dampaknya. Sedangkan daerah yang belum dibangun diupayakan agar kelestariannya dapat terjaga dengan cara memperketat pemberian izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB).¹⁸

IV. Penutup

Penelitian yang digunakan berdasarkan studi literatur mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menemukan kejelasan yang tegas terkait penegakan hukum terhadap pembangunan di wilayah tanah sempadan pantai. Hal ini menyebabkan masyarakat secara tidak sadar melakukan pelanggaran demi kepentingan pribadi dalam sektor pariwisata dan kuliner. Penulis menyimpulkan bahwa penting untuk mengingat tanah sebagai fungsi sosial dan hukum positif di Indonesia menegaskan perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari dinamika pantai seperti abrasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum oleh pemerintah daerah dengan cara mengalih fungsikan tanah sempadan pantai yang sebelumnya dikuasai untuk kepentingan pribadi, kemudian diambil alih oleh pemerintah daerah setempat untuk membangun tempat usaha baru bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata dan kuliner dengan memperhatikan garis sempadan terbaru. Langkah ini juga harus disertai dengan pembentukan satuan tugas khusus berbagai stakeholder untuk mengedukasi masyarakat dan mengontrol pengelolaan tanah sempadan pantai, dengan tujuan mencegah erosi tanah setiap tahunnya sebagai langkah preventif terhadap kerugian yang mungkin timbul

¹⁷ Anjiwani, P. K, op.cit. (2016), hlm. 3.

¹⁸ Reskiyanti, dkk, P. K, op.cit, (2018).

di masa depan bagi masyarakat lokal serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah regional tersebut.

Reformasi hukum di tingkat pemerintah daerah perlu disesuaikan dengan wilayahnya untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dan DPR harus segera merumuskan undang-undang yang jelas dan tegas mengenai status kepemilikan bangunan di kawasan tanah sempadan pantai. Hal ini penting agar kepastian hukum terjamin dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik serta progresif.

Daftar Pustaka

Buku

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Jurnal

Anjiwani, P. K., "Pengaturan hukum terhadap privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pantai di provinsi Bali". *Analisis Pariwisata*, vol. 16, no. 1, 2016.

Fauzan, dkk., "Penegakan Hukum terhadap Bangunan di Wilayah Pesisir Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Kearifan Lokal", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 4 No. 1, 2024.

Rejekiingsih, T., "Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (Suatu tinjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 2, 2016

Reki, N. D., "Pembatasan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dalam perspektif reforma agraria", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Reskiyanti, dkk., "Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2014", *Sensistel*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Salvian, dkk., "Kepastian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Bagi Pemilik Sebidang Tanah Yang Diperuntukkan Sebagai Sempadan Pantai", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No.2, 2020.

Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional" *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Yuwono, dkk., "Telaah Sosiologis Penyebab Pelanggaran Penguasaan Tanah Di Lingkungan Pesisir Di Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5, No. 2021.

Zainah, Z. O., "Penegakan hukum dalam masyarakat", *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 3, No. 2, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.